

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Kondisi ini disebabkan karena PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak signifikan dibandingkan dana transfer yang diterima sehingga pemerintah daerah cenderung mengutamakan dana yang penerimaannya relatif lebih besar untuk menunjang kepentingannya.
2. DAU secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki besaran nilai DAU yang diterima masing-masing daerah cenderung meningkat setiap tahun. Kondisi ini menjadi celah tersendiri bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai belanja sesuai preferensi yang menguntungkan pihak tertentu.
3. SiLPA secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. SiLPA merupakan indikator efisiensi apabila bersumber dari penghematan belanja. Namun kondisi yang terjadi, ada kecenderungan penyusun anggaran melakukan *mark-up* belanja dan *mark-down* pendapatan, sehingga efisiensi yang ditunjukkan dari besaran SiLPA hanya bersifat semu ketika output anggaran tidak tercapai
4. PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Semakin tinggi PAD, DAU dan SiLPA maka perilaku oportunistik penyusun anggaran semakin meningkat.

5.2 Saran

1. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber daya yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama dari PAD tersebut ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum. Tidak berpengaruhnya PAD terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran merupakan hal yang harus dipertahankan oleh pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi alokasi anggaran belanja dengan menetapkan keputusan terkait penggunaan anggaran yang diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang ada dan terbebas dari upaya-upaya penyalagunaan wewenang untuk menunjang kepentingan pribadi.
2. DAU merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dimana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan prioritas pemerintah daerah. Berpengaruhnya DAU terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran merupakan bukti bahwa dalam penggunaannya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik para penyusun anggaran untuk mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan prefensinya masing-masing. Untuk itu hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pembatasan atau mengurangi salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut ialah dengan memastikan bahwa penggunaan, pengalokasian, prosedur pencairan dana, skala prioritas dana dan peruntukannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. SiLPA tahun lalu dapat digunakan sebagai penerimaan pembiayaan ditahun berjalan. Untuk mengantisipasi penggunaan SiLPA yang berkaitan dengan perilaku oportunistik dalam pengalokasian belanja, pemerintah harus lebih cermat dalam melakukan analisis atas jumlah saldo anggaran lebih yang akan digunakan serta alasan dan besaran jumlah yang dikeluarkan harus jelas.
4. Berdasarkan nilai koefisien determinasi pengaruh PAD, DAU dan SiLPA secara simultan sebesar 63,7%, menunjukkan bahwa masih terdapat 36,3 %

pengaruh variabel lain yang mampu menjelaskan variasi variabel perilaku oportunistik penyusun anggaran, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain yang berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran seperti pinjaman daerah yang belum dapat dikembangkan pada penelitian ini karena keterbatasan data yang tersedia.